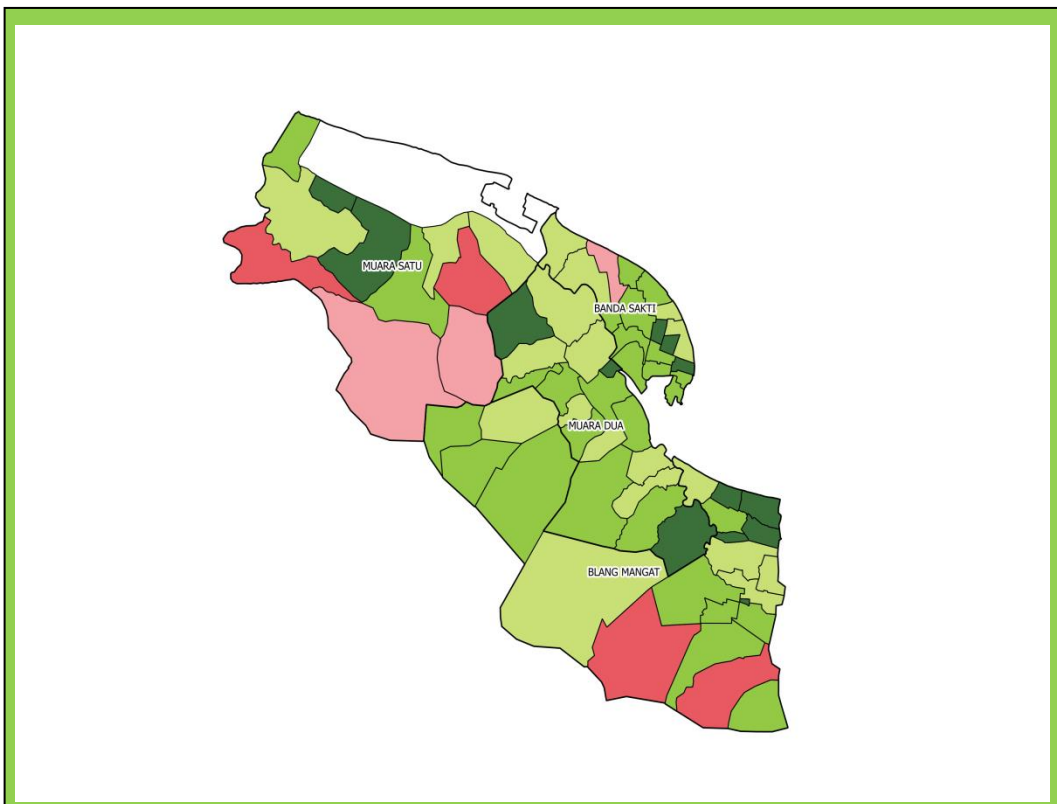


# LAPORAN

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN  
*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) PROVINSI ACEH*  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN  
2022



DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN  
DAN PANGAN  
KOTA LHOKSEUMAWE



## **SAMBUTAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kita mendapat kenikmatan dan berada dalam keadaan sehat wal a'fiat. Shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan umatnya sampai akhir zaman.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ketahanan pangan akan mudah terwujud, apabila antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat bersama-sama berkomitmen, konsisten dan bersinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Kemampuan untuk menghasilkan pangan dan terwujudnya ketahanan pangan, bukan kondisi yang bersifat statis, melainkan bersifat dinamis. Artinya, bahwa keberhasilan pencapaian produksi pangan, belum sepenuhnya menjamin tercapainya ketahanan pangan. Hal ini mengingat pangan tersebut, belum tentu sepenuhnya dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat.

Berbagai tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut, juga terus dihadapkan dengan penambahan jumlah penduduk dengan angka cukup tinggi, yang tentunya memerlukan pemenuhan bahan pangan yang cukup, berkualitas dengan harga yang terjangkau daya beli masyarakat. Beberapa bentuk implementasi program dalam rangka tantangan pembangunan ketahanan pangan, termasuk diantaranya antisipasi untuk penanganan terjadinya kerawanan pangan transien akibat terjadinya bencana maupun kronis akibat struktur masyarakat yang miskin dan kondisi infrastruktur desa yang buruk.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka

upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komperhensif. Maka disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* sebagai salah satu instrument yang dapat digunakan untuk monitoring ketahanan pangan wilayah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional dan FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan maka disusun pula FSVA Kota Lhokseumawe dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat berdasarkan cakupan wilayahnya. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan di wilayah Kota Lhokseumawe maka dilakukan Penyusunan Peta FSVA Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semoga segala upaya yang kita lakukan dalam membangun Kota Lhokseumawe menjadi lebih baik dan dapat di ridhai Allah SWT.

Lhokseumawe, November 2022

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE



Dr. Drs. IMRAN, M.Si, MA.Cd

## KATA PENGANTAR

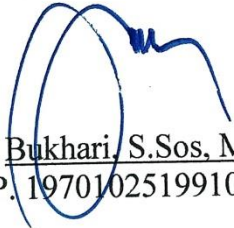
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh 2022 merupakan Laporan tahunan yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Laporan ini terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak instansi di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Walaupun Laporan ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan laporan ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

Lhokseumawe, 14 November 2022

Plt. Kepala Dinas, Kelautan, Perikanan, Pertanian  
Dan Pangan Kota Lhokseumawe



Bukhari, S.Sos, M.Si  
NIP. 197010251991031002

## DAFTAR ISI

**Sambutan Walikota**

**Kata Pengantar**

**Ringkasan Eksekutif**

<b>I</b>	<b>Pendahuluan</b> .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi .....	4
	1.3. Metodologi .....	8
	1.4. Metode Analisis.....	10
<b>2</b>	<b>Ketersediaan Pangan</b> .....	13
	2.1. Lahan Pertanian .....	13
	2.2. Produksi Pangan .....	14
	2.3. Sarana dan Prasarana Ekonomi .....	15
	2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan .....	18
<b>3</b>	<b>Akses Pangan</b> .....	20
	3.1. Tingkat Kesejahteraan Rumah tangga .....	20
	3.2. Akses Transportasi .....	22
	3.4. Strategi Peningkatan Akses Pangan .....	23
<b>4</b>	<b>Pemanfaatan Pangan</b> .....	24
	4.1. Akses Terhadap Air Bersih .....	24
	4.2. Rasio Tenaga Kesehatan .....	25
	4.3. Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan .....	26
	4.3. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan .....	22
<b>5</b>	<b>Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Komposit</b> .....	35
	5.1. Kondisi Ketahanan Pangan .....	35
	5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan .....	37
<b>6</b>	<b>Rekomendasi Kebijakan</b> .....	38

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kabupaten/Kota merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi

berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis FSVA Kota Lhokseumawe Tahun 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 7 desa dari 68 desa (10,29%) yang terdiri dari 4 desa (5,88%) Prioritas 2 dan 3 desa (4,41%) Prioritas 3. Desa prioritas 2 tersebar di Desa Blang Buloh dan Asan Kareung di Kecamatan Blang Mangat; dan Desa Meunasah Dayah dan Ujong Pacu di Kecamatan Muara Satu. Desa prioritas 3 tersebar 3 desa, yaitu Desa Cot Trieng dan Paloh Punti di Kecamatan Muara Satu dan Desa Ulee Jalan di Kecamatan Banda Sakti.
7. Karakteristik desa rentan pangan ditandai dengan rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk, jumlah tenaga kesehatan serta akses terhadap sarana air bersih.
8. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan desa diarahkan pada kegiatan: a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya; pembangunan infrastruktur dasar (Sarana MCK, listrik, Poskesdes/Pustu), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah b. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan c. Penyediaan tenaga kesehatan d. Program pekarangan pangan lestari, dan e. Pemberdayaan bahan pangan lokal.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan dan 68 desa dengan total penduduk sebesar 210.177 jiwa (BPS). Secara geografis terletak di bagian utara garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 96° 20' - 97°21' Bujur Timur dan memanjang dari barat ke timur di antara 4° 54' - 5°18' Lintang Utara/Selatan. Kota Lhokseumawe di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara yang memiliki wilayah daratan seluas 181,06 km<sup>2</sup> atau 18.106 ha dan wilayah perairan (laut) diperkirakan seluas 36 km<sup>2</sup> atau 3.600 ha. Secara klimatologis, Kota Lhokseumawe memiliki pola tipe curah hujan tipe , yaitu daerah basah memiliki curah hujan lebih dari 2.000 mm per tahun dan daerah kering memiliki curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun. Rata-rata curah hujan tahun 2020 sekitar 117 mm, sedangkan rata-rata suhu udara minimum 22 °C dan suhu udara maksimum 34 °C.

Perekonomian Kota Lhokseumawe tergantung pada sektor perdagangan besar dan eceran yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor perdagangan besar dan eceran ini tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun 2016 peranannya turun dari 23,18 % menjadi 21,89 %. Penurunan ini disebabkan beberapa sub sektor yang ada dalam sektor lapangan usaha mengalami kenaikan peranan. Selain sektor perdagangan, sektor yang mengalami penurunan tahun 2016 adalah sektor pertambangan dan penggalian, yaitu dari 0,46 %



menjadi 0,37 %; sektor Transportasi dan pergudangan dari 12,04 % menjadi 10,41. Sementara sektor lainnya mengalami peningkatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menunjukkan peranan sebesar 9,36 %, sektor Jasa Keuangan dan asuransi sebesar 2,98 %, sektor Real Estate sebesar 4,68 %, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 3,27 %, dan sektor Administrasi pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan social wajib sebesar 4,35 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih sangat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam melakukan pembangunan.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and*

*Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten/kota pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten/kota menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah.

## 1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

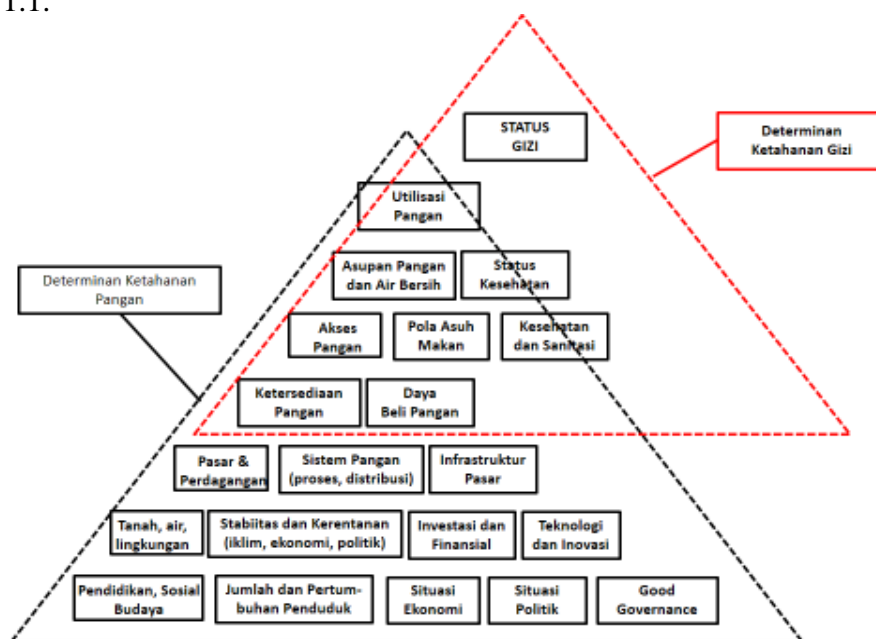
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition*

*Security*. Pada tahun 2012 FAO<sup>1</sup> mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013<sup>2</sup> juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan

pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistem kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

### **1.3. METODOLOGI**

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

### **1.4. INDIKATOR**

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan yaitu Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah, Jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga, Jumlah penduduk kurang sejahtera terhadap jumlah penduduk, Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai, Jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga, Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk

**Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten/Kota 2022**

<b>Indikator</b>	<b>Definisi</b>	<b>Sumber Data</b>
<b>A. Aspek Ketersediaan Pangan</b>		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2021
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah Rumah Tangga 2021 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2019 desa
<b>B. Aspek Akses terhadap Pangan</b>		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk Desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2020) Jumlah Rumah Tangga 2021 dari Proyeksi SP 2019
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS
<b>C. Aspek Pemanfaatan Pangan</b>		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2021)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk Desa	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah penduduk 2021 dari Proyeksi SP 2019



## 1.5. METODE ANALISIS

### 1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

### 2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Global Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

$Y_j$  : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

$a_i$  : Bobot masing-masing indikator

$X_{ij}$  : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

**Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu**

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
<b>Sub Total</b>		<b>1/3</b>

c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot

indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(J) = \sum_{n=1}^9 \alpha_i C_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

$K_j$  : *cut off point* komposit ke-J  $\alpha_i$  : Bobot indikator ke-i

$C_{ij}$  : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

### 3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

## **BAB 2**

### **KETERSEDIAAN PANGAN**

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

#### **2.1. LAHAN PERTANIAN**

Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah desa. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah desa digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan<sup>1</sup>. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah desa maka diasumsikan

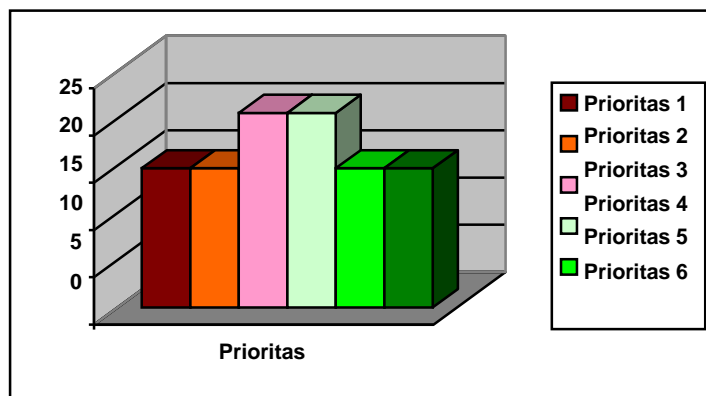
ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 68 desa di Kota Lhokseumawe, 10 desa masuk dalam prioritas 1 (14,71 %) yaitu, 10 desa prioritas 2 (14,71 %) dan 14 desa prioritas 3 (20,59 %). Kecamatan yang memiliki rasio lahan prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Banda Sakti yaitu sebanyak 18 desa

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Desa	Persentase
1	$\leq 0,0000$	10	14,71
2	0,0000-0,0000	10	14,71
3	0,0000-0,0077	14	20,59
4	0,0077-0,0560	14	20,59
5	0,0560-0,2043	10	14,71
6	$> 0,2043$	10	14,71

Grafik 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas



## 2.2. PRODUKSI PANGAN

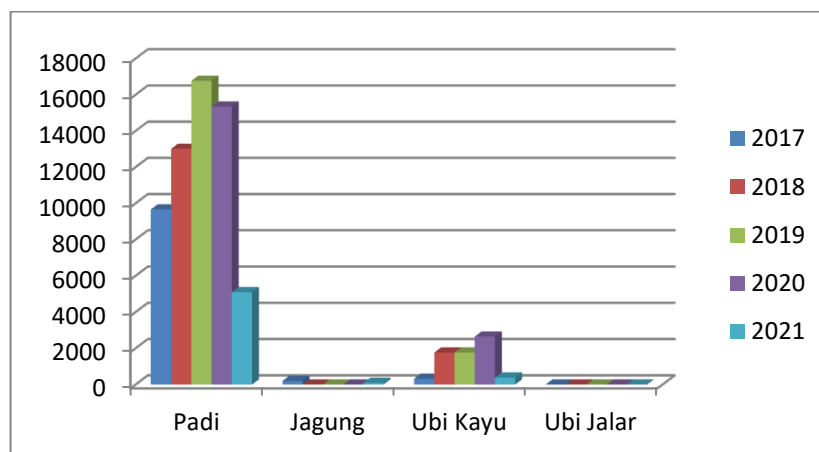
Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 9,36 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 dan

memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kota Lhokseumawe yang menyumbang hampir 99 % dari total produksi sereal daerah. Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.1, produksi umbi-umbian di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan/penurunan sejak tahun 2017. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Produksi padi mengalami kenaikan dan penurunan selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 9.657 ton tahun 2016 menjadi 5.090 ton pada tahun 2021.

Tabel 2.2 Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian 2017-2021 (Ton)

Sereal	2017	2018	2019	2020	2021
Padi	9.657	13.005	16.764	15.333	5.090
Jagung	198	-	-	-	87
Ubi ayu	317	1.764	1.764	2.640	384
Ubi Jalar	-	-	-	-	-

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka 2016-2021, BPS



Grafik 2.2. Produksi Sereal Pokok dan Umbi-umbian tahun 2017-2021

### **Padi**

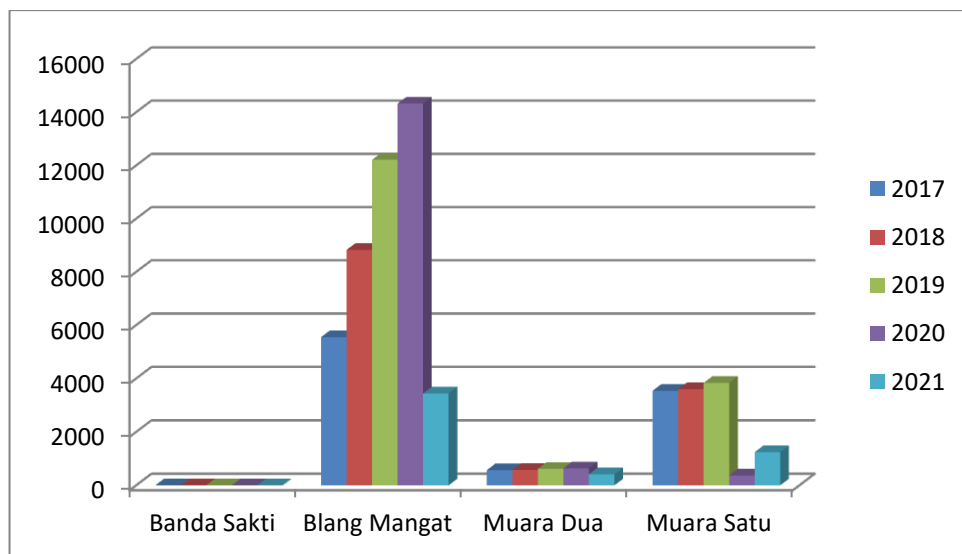
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kota Lhokseumawe selama 4 tahun terakhir (2017- 2021) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.4. Produksi padi

mengalami penurunan pada tahun 2021 di 2 kecamatan. Penurunan terjadi di kecamatan Blang Mangat, Muara Satu dan Muara Dua disebabkan oleh kerusakan saluran irigasi. Produksi padi tertinggi di kecamatan Blang Mangat sebesar 3.437,50 ton pada tahun 2021.

Tabel 2.4 Produksi Padi 2017 - 2021 (Ton)

Kecamatan	Produksi Padi (Ton)				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. Banda Sakti	0	0	0	0	0
2. Blang Mangat	5.547	8.826,7	12.311	14.324,7	3.437,50
3. Muara Dua	570	579,2	617,5	636,3	412,50
4. Muara Satu	3.540	3.599	3.835	371,0	1.243,00
Jumlah	9.657	13.004,90	16.764,1	15.333	5.090,00

Sumber: DKP3 Kota Lhokseumawe, diolah



Grafik 2.3. Produksi Padi 2018 - 2021 (Ton)

### 2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa.

Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

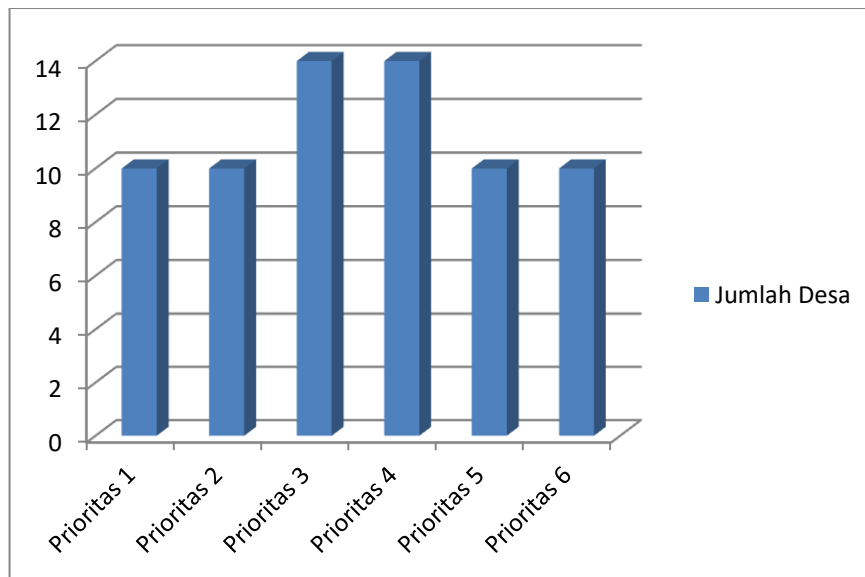
Dari 68 desa di Kota Lhokseumawe, 10 desa masuk dalam prioritas 1 (14,70 %), 10 desa prioritas 2 (14,70 %), 14 desa prioritas 3 (20,58 %), 14 desa prioritas 4 (20,58 %), 10 desa prioritas 5 (14,70 %) dan 10 desa prioritas 6 (14,70 %).

Tabel 2.8 Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	Prioritas 1	$\leq 0,0250$	10	14,70
2	Prioritas 2	0,0250 – 0,0403	10	14,70
3	Prioritas 3	0,0403 - 0,0612	14	20,58
4	Prioritas 4	0,0612 – 0,0722	14	20,58
5	Prioritas 5	0,0722 – 0,1036	10	14,70
6	Prioritas 6	$> 0,1036$	10	14,70

Sebaran Jumlah Desa/ Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas dapat dilihat pada Grafik 2.4. berikut ini :





Grafik 2.4. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi Berdasarkan Prioritas

## 2.4. STRATEGI PEMENUHAN KETERSEDIAAN PANGAN

Laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe dari tahun 2017-2021 mencapai 2,10 % per tahun sementara pertumbuhan produksi padi rata-rata mencapai 0,1 %. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 0,35 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar Sementara itu laju konversi lahan sebesar 0,01 %. Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 11,89%. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe mengenai ketersediaan pangan pada periode 2017-2022 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

### (i) Peningkatan produktivitas

- a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)

- b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
- c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
- d. Pengelolaan tanah dan air
- e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

**(ii) Optimalisasi lahan sawah**

- a. Pengembangan lahan sawah
- b. Optimalisasi penggunaan lahan
- c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Desa (JIDES)
- d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung

**(iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko**

- a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
- b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

**(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani**

- a. Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- b. Pemberdayaan Lembaga Tani di Tingkat Desa
- c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
- d. Pemasaran produk pertanian, missal TTI, dll

## **BAB 3**

### **AKSES TERHADAP PANGAN**

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) Akses ekonomi: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) Akses fisik: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) Akses sosial: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

#### **3.1. PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH**

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Lhokseumawe Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan dari 12,32 % tahun 2017 menjadi 11,16 % tahun 2021. Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Lhokseumawe

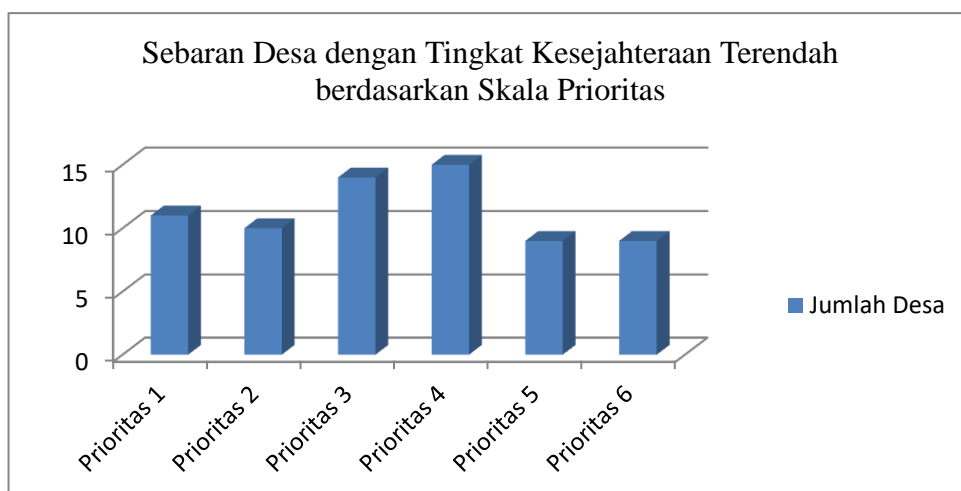
Keterangan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penduduk miskin	12,32	11,81	11,18	10,80	11,16

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka, BPS, 2022.

Pada tingkat desa berdasarkan data Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin tahun 2021, terdapat 11 desa yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah diatas 16,18 % (Prioritas 1). Sebanyak 10 desa (14,71 %) masuk prioritas 2, dan 14 desa (20,59 %) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 35 desa tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,0385$	11	16,18
2	$0,0238 < 0,0385$	10	14,71
3	$0,0116 < 0,0238$	14	20,59
4	$0,0047 < 0,0116$	15	22,06
5	$0,0022 < 0,0047$	9	13,23
6	$\leq 0,0022$	9	13,23



## AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada desa terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk

menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2019, BPS, di Kota Lhokseumawe, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepanjang tahun. Secara umum di Kota Lhokseumawe, seluruh Desa di 4 (empat) Kecamatan dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun.

### **Strategi Peningkatan Akses Pangan**

Strategi Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota Lhokseumawe tahun 2022-2027 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat perdesaan
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa-kota, pulau-pulau kecil dan daerah terisolir
- Mendorong pengembangan pelabuhan secara terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya dalam melayani kawasan perkotaan dan perdesaan.

## **BAB 4**

### **PEMANFAATAN PANGAN**

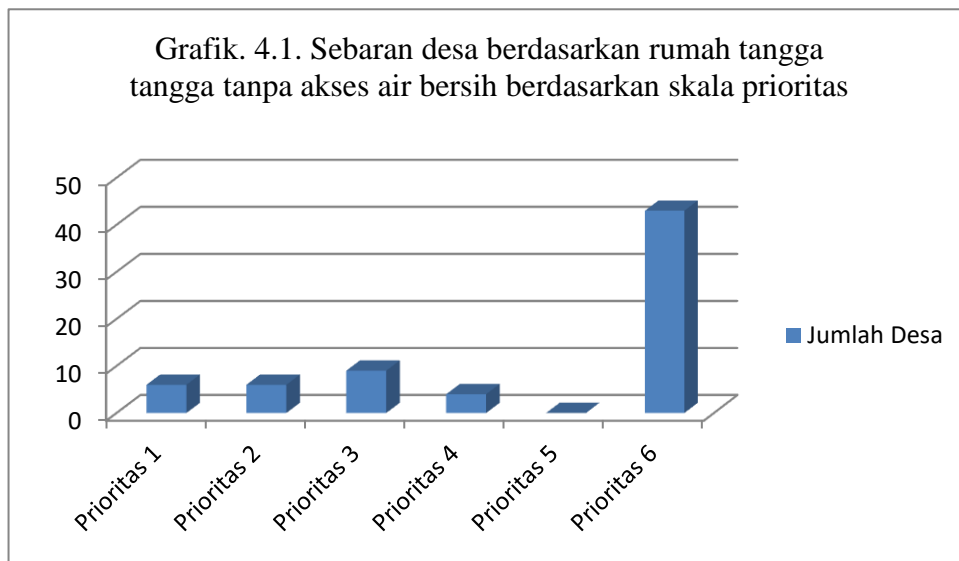
Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

#### **AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH**

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di desa. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak<sup>1</sup>. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Tabel 4.1 Sebaran desa berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,0930$	6	8,82
2	$0,0424 - < 0,0930$	6	8,82
3	$0,0077 - < 0,0424$	9	13,23
4	$0,0011 - < 0,0077$	4	5,89
5	$0,0000 - < 0,0011$	-	-
6	$\leq 0,0000$	43	63,24



## RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

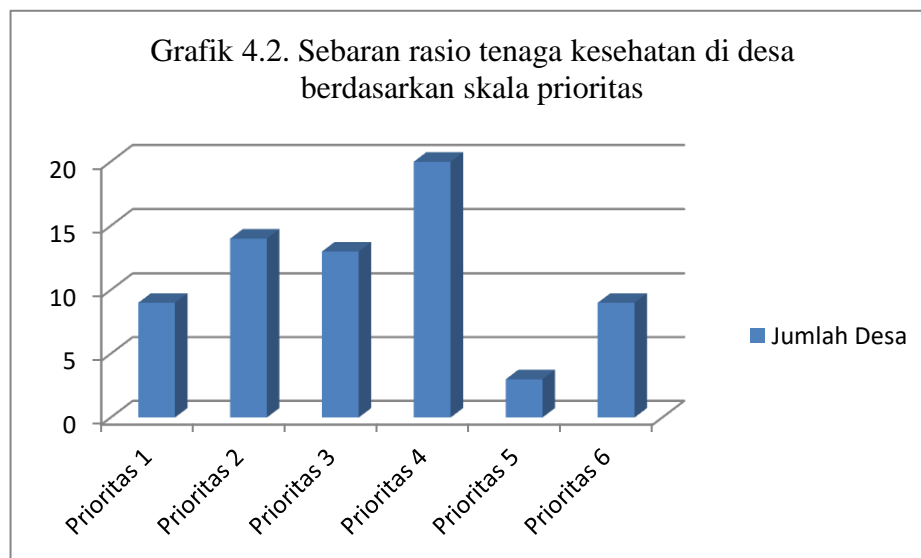
Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk



menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di desa berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,7986$	9	13,23
2	$0,3112 < 0,7986$	14	20,59
3	$0,1400 < 0,3112$	13	19,13
4	$0,0363 < 0,1400$	20	29,41
5	$0,0161 < 0,0363$	3	4,41
6	$< 0,0161$	9	13,23



## DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari -2 dari

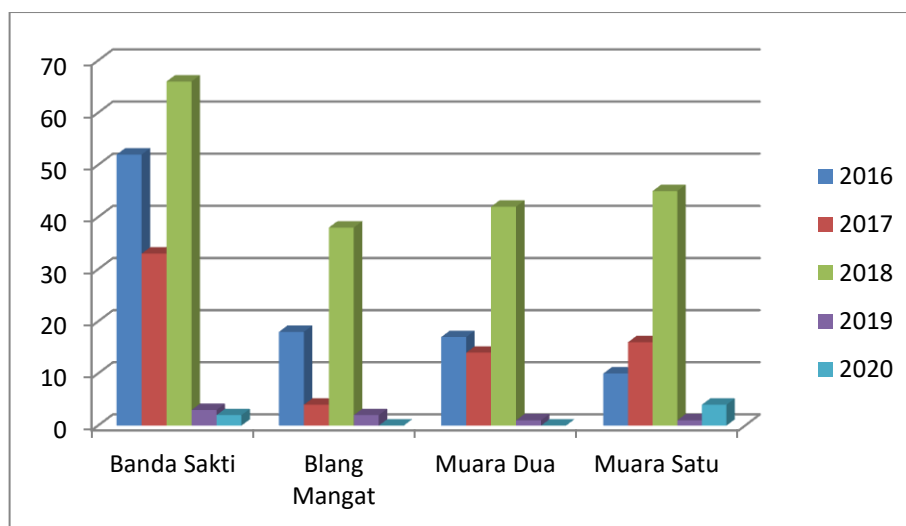
median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);

2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari- 2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebanyak 6 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Blang Mangat (2 balita), Kecamatan Banda Sakti (3 balita), Kecamatan Muara Dua (1 balita) dan Kecamatan Muara Satu (1 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Muara Dua (1 balita) dan Kecamatan Muara Satu (1 balita).

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2016-2020

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk (Orang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banda Sakti	52	33	66	3	2
2	Blang Mangat	18	4	38	2	0
3	Muara Dua	17	14	42	1	0
4	Muara Satu	10	16	45	1	4
	<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>67</b>	<b>191</b>	<b>7</b>	<b>6</b>

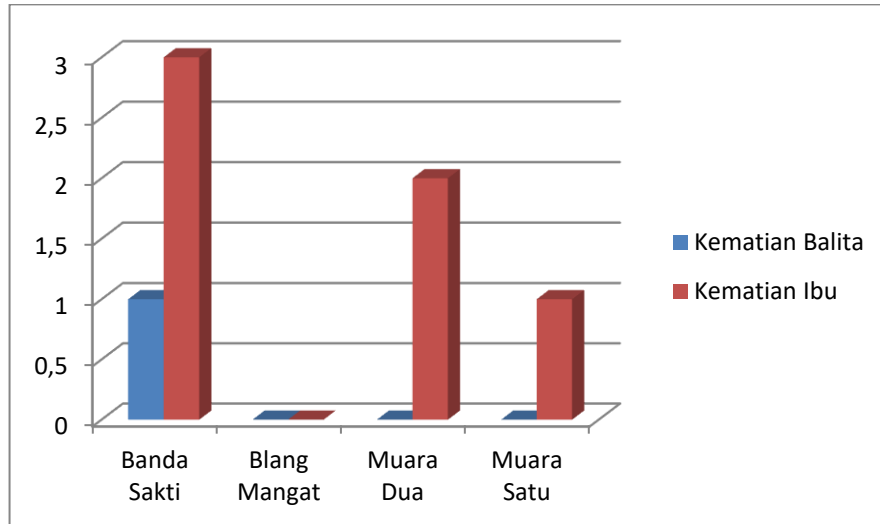


Gambar 4.3. Grafik Penderita Gizi Buruk

Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe adalah 7 jiwa pada tahun 2021. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Lhokseumawe adalah 6 jiwa. Angka kematian balita terdapat di Kecamatan Banda Sakti (1 jiwa). Angka kematian ibu saat melahirkan tertinggi di Kecamatan Banda Sakti (3 jiwa), sementara kecamatan tanpa angka kematian ibu saat melahirkan di Kecamatan Blang Mangat. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan, tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Banda Sakti	1	3	4
2	Blang Mangat	0	0	0
3	Muara Dua	0	2	2
4	Muara Satu	0	1	1
	<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>7</b>



Gambar 4.4. Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

#### 4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Strategi untuk memperbaiki status gizi dan kesehatan kelompok rentan di Kota Lhokseumawe dilakukan secara berkelanjutan dimulai dari remaja putri di usia remaja hingga menikah dan hamil. Upaya perbaikan dan peningkatan gizi di Kota Lhokseumawe antara lain dilakukan melalui :

1. Pemberian FE kepada remaja putri 1 minggu 1 tablet dimulai sejak remaja putri usia 15- 18 tahun.
2. Skrening gizi pada calon pengantin yaitu pemeriksaan IMT dan anemia dan penyakit yang diderita.
3. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan skrening ketat 10 T dan penggunaan buku KIA selama hamil wajib periksa minimal 2 kali pada trimester ketiga akhir ibu hamil sudah dapat dipastikan (ibu hamil normal atau hamil beresiko tinggi).
4. Pada masa bayi 0-6 tahun dengan pemberian ASI eksklusif.
5. Masa bayi 6 -24 bulan dengan pemberian ASI, makanan pendamping ASI dan skrening tumbuh kembang dan stimulasi tumbuh kembang, vitamin A dan

penanganan balita sakit dengan MBTS.

6. Masa anak balita 1-6 tahun dengan pemberian vitamin A, pemberian makanan tambahan serta penanganan penyakit dengan MBTS, skrining tumbuh kembangnya dan masuk ke kelompok PAUD.

Masalah gizi kronis (stunting) yang masih tinggi di Kota Lhokseumawe, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab

kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. **Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:**
  - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
  - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
  - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
  - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

## **2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi tiga penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).**

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.

### **a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):**

- Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
- Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
- Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
- Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.

- Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganeekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
  - b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
- 3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.**

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Salah satu strategi untuk perbaikan gizi balita adalah pemanfaatan Dana Desa dengan dukungan pengalokasian anggaran untuk kegiatan Peningkatan Posyandu Aktif dengan pemberian makanan pendamping ASI yang dilakukan sebulan sekali. Sehingga



ditargetkan terjadi peningkatan gizi baik bagi ibu hamil maupun anak balita. Disamping itu mendorong pemanfaatan olahan sumber bahan pangan lokal yang lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman sebagai alternatif pengganti bahan makanan.

## **BAB 5**

### **KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT**

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

#### **KONDISI KETAHANAN PANGAN**

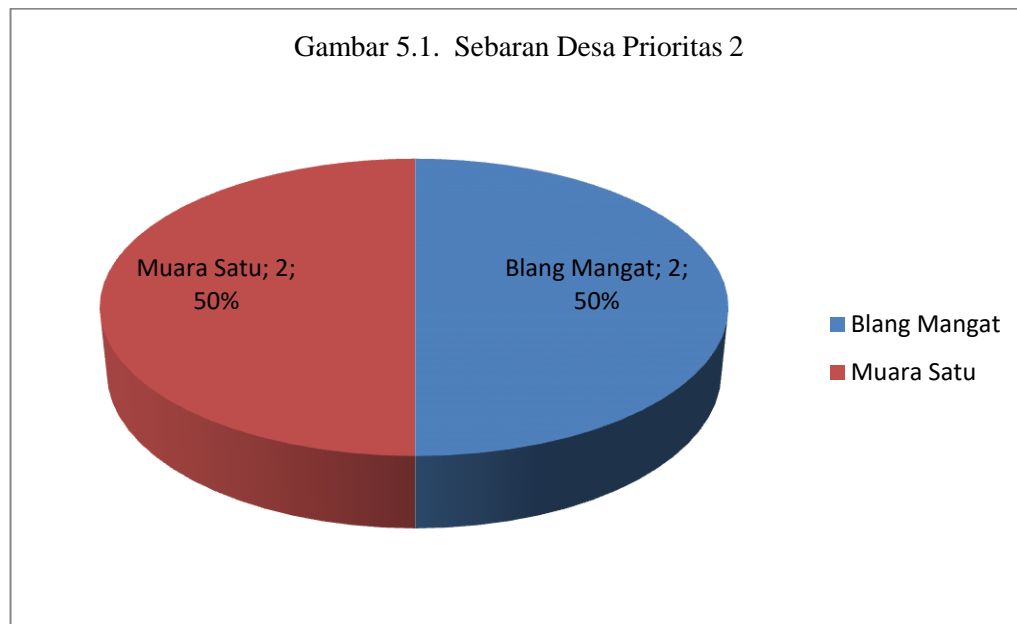
Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 68 desa yang ada di Kota Lhokseumawe maka didapatkan 4 desa (Prioritas 2), 3 desa (Prioritas 3), 20 desa (Prioritas 4), 28 desa (Prioritas 5) dan 13 desa (Prioritas 6).

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

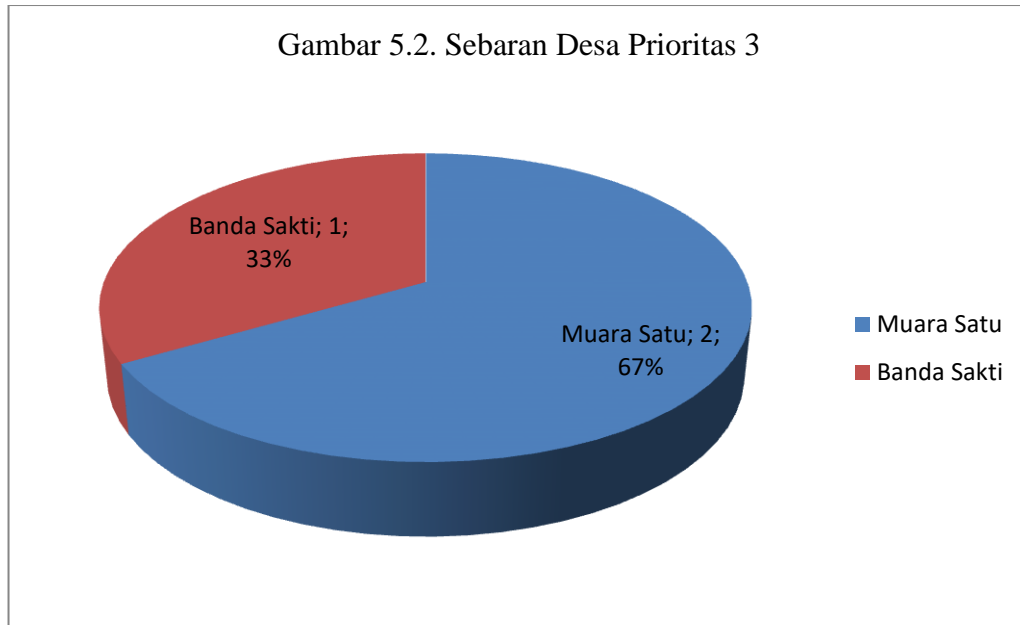
Prioritas	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	-	-
2	4	5,88
3	3	4,41
4	20	29,41
5	28	41,18
6	13	19,12
<b>JUMLAH</b>	<b>68</b>	<b>100,00</b>

Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 2 terdapat di wilayah Kecamatan Blang Mangat (2 desa), dan Kecamatan Muara Satu (2 desa) (Gambar 5.1).



Desa rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Muara Satu (2 desa), dan Kecamatan Banda Sakti (1 desa) (Gambar 5.2).

Gambar 5.2. Sebaran Desa Prioritas 3



### **FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN**

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) Kurangnya prasarana ekonomi di desa, (2) Kurangnya jumlah tenaga kesehatan, dan (3) tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah serta (4) akses terhadap sarana air bersih.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh: (1) Kurangnya prasarana ekonomi di desa, (2) Kurangnya jumlah tenaga kesehatan, dan (3) tingkat kesejahteraan penduduk yang masih rendah serta (4) akses terhadap sarana air bersih.

## **BAB 6**

### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa-desanya prioritas 1-3 yang tersebar di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
- b. Desa-desanya yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain
- c. Desa-desanya yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan dan akses terhadap sarana air bersih.
- d. Desa-desanya pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusianya masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

**Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan**



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan dan Penyediaan tenaga kesehatan.



### Lampiran 7. Indek Prioritas Komposit

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BLANG MANGAT	1174010	1174010001	ALUE LIM	0	5	1	4	2	2	63,47	56	4
2	BLANG MANGAT	1174010	1174010002	BLANG BULOH	0	6	1	4	6	1	52,30	66	2
3	BLANG MANGAT	1174010	1174010003	MANE KAREUNG	0	6	3	4	6	2	69,62	19	5
4	BLANG MANGAT	1174010	1174010004	ASAN KAREUNG	0	6	1	4	6	1	54,07	65	2
5	BLANG MANGAT	1174010	1174010005	RAYEUK KAREUNG	0	5	2	4	6	2	68,12	29	5
6	BLANG MANGAT	1174010	1174010006	KUMBANG PUNTEUT	0	4	3	4	6	4	68,11	30	5
7	BLANG MANGAT	1174010	1174010007	BLANG PUNTEUT	0	4	4	4	1	4	66,58	40	5
8	BLANG MANGAT	1174010	1174010008	ULEE BLANG MANE	0	5	1	4	6	3	64,04	54	4
9	BLANG MANGAT	1174010	1174010009	KEUDE PUNTEUT	0	6	6	4	3	6	99,39	1	6
10	BLANG MANGAT	1174010	1174010010	MESJID PUNTEUT	0	5	3	4	4	2	70,42	15	5
11	BLANG MANGAT	1174010	1174010011	TUNONG	0	3	3	4	6	1	64,26	51	4
12	BLANG MANGAT	1174010	1174010012	BALOY	0	4	1	4	6	4	64,81	50	4
13	BLANG MANGAT	1174010	1174010013	TEUNGOH	0	6	3	4	6	3	75,07	5	6
14	BLANG MANGAT	1174010	1174010014	BLANG TEUE	0	6	2	4	6	3	73,48	6	6
15	BLANG MANGAT	1174010	1174010015	JAMBO TIMU	0	6	4	3	6	4	72,27	8	6
16	BLANG MANGAT	1174010	1174010016	JAMBO MESJID	0	5	4	4	6	4	71,79	11	6
17	BLANG MANGAT	1174010	1174010017	BLANG CUT	0	4	5	4	6	3	69,18	21	5
18	BLANG MANGAT	1174010	1174010018	KUALA MEURAKSA	0	3	6	4	1	3	62,54	60	4
19	BLANG MANGAT	1174010	1174010019	JEULEUKAT	0	4	3	4	6	2	66,87	34	5
20	BLANG MANGAT	1174010	1174010020	BLANG WEU PANJOU	0	5	2	4	3	2	68,28	27	5
21	BLANG MANGAT	1174010	1174010021	BLANG WEU BAROH	0	4	2	4	6	1	63,73	55	4



22	BLANG MANGAT	1174010	1174010022	SEUNEUBOK	0	5	6	4	6	2	70,35	16	5
23	MUARA DUA	1174020	1174020002	PALOH BATEE	0	5	3	4	6	6	69,70	18	5
24	MUARA DUA	1174020	1174020003	LHOK MON PUTEH	0	5	1	4	6	3	66,98	33	5
25	MUARA DUA	1174020	1174020004	COT GIREK	0	3	4	4	6	3	67,54	31	5
26	MUARA DUA	1174020	1174020005	MANYANG	0	3	1	4	6	4	63,42	57	4
27	MUARA DUA	1174020	1174020006	BLANG CRUM	0	3	3	4	6	4	66,85	35	5
28	MUARA DUA	1174020	1174020007	ALUE AWE	0	6	6	3	6	4	80,46	2	6
29	MUARA DUA	1174020	1174020008	CUT MAMPLAM	0	3	2	4	6	3	65,60	47	4
30	MUARA DUA	1174020	1174020009	MNS MEE	0	5	4	4	6	4	70,65	14	5
31	MUARA DUA	1174020	1174020010	MNS BLANG	0	3	3	4	6	4	65,91	44	4
32	MUARA DUA	1174020	1174020011	UTEUNKOT	0	4	4	4	6	2	68,95	23	5
33	MUARA DUA	1174020	1174020012	BLANG POHROH	0	4	1	4	6	3	64,07	53	4
34	MUARA DUA	1174020	1174020013	PAYA PUNTEUT	0	3	4	4	6	3	66,72	38	5
35	MUARA DUA	1174020	1174020014	KEUDE CUNDA	0	6	5	4	2	4	79,60	3	6
36	MUARA DUA	1174020	1174020015	MNS MESJID	0	2	6	4	6	2	66,17	42	4
37	MUARA DUA	1174020	1174020016	PANGGOI	0	3	5	4	6	1	65,71	45	4
38	MUARA DUA	1174020	1174020017	PAYA BILI	0	6	4	4	2	2	72,06	9	6
39	MUARA DUA	1174020	1174020018	MNS ALUE	0	2	4	4	1	2	63,37	58	4
40	MUARA SATU	1174021	1174021001	COT TRIENG	0	3	3	4	1	1	60,30	62	3
41	MUARA SATU	1174021	1174021002	PALOH PUNTI	0	2	2	4	1	1	57,64	64	3
42	MUARA SATU	1174021	1174021003	MNS DAYAH	0	2	1	4	3	2	49,17	68	2
43	MUARA SATU	1174021	1174021004	BLANG PANYANG	0	3	2	4	4	2	65,39	48	4
44	MUARA SATU	1174021	1174021005	MEURIA	0	1	5	4	6	3	65,65	46	4
45	MUARA SATU	1174021	1174021006	BLANG PULO	0	6	3	4	3	4	71,24	13	6
46	MUARA SATU	1174021	1174021007	BATUPHAT TIMUR	0	5	5	4	6	3	71,99	10	6
47	MUARA SATU	1174021	1174021008	PADANG SAKTI	0	5	4	4	6	2	68,73	25	5
48	MUARA SATU	1174021	1174021009	UJONG PACU	0	5	1	4	1	6	49,19	67	2
49	MUARA SATU	1174021	1174021010	BLANG NALEUNG	0	5	2	4	2	3	66,82	37	5



### Lampiran 10. Sebaran Desa Prioritas 2

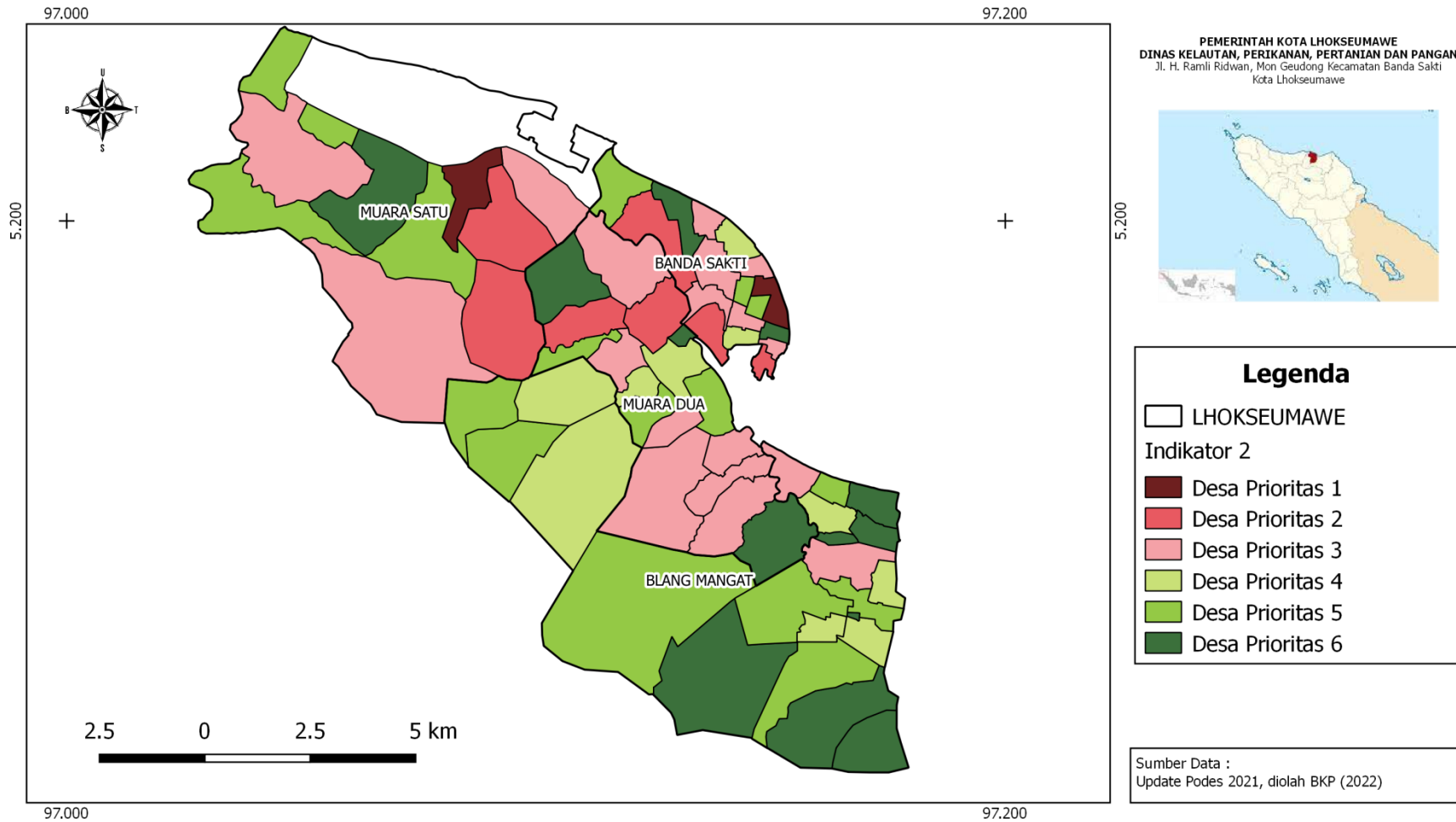
No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BLANG MANGAT	BLANG BULOH	0	6	1	4	6	1	66	2
2	BLANG MANGAT	ASAN KAREUNG	0	6	1	4	6	1	65	2
3	MUARA SATU	MNS DAYAH	0	2	1	4	3	2	68	2
4	MUARA SATU	UJONG PACU	0	5	1	4	1	6	67	2

### Lampiran 11. Sebaran Desa Prioritas 3

No.	Nama Kec	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	MUARA SATU	COT TRIENG	0	3	3	4	1	1	62	3
2	MUARA SATU	PALOH PUNTI	0	2	2	4	1	1	64	3
3	BANDA SAKTI	ULEE JALAN	0	6	1	4	3	4	63	3

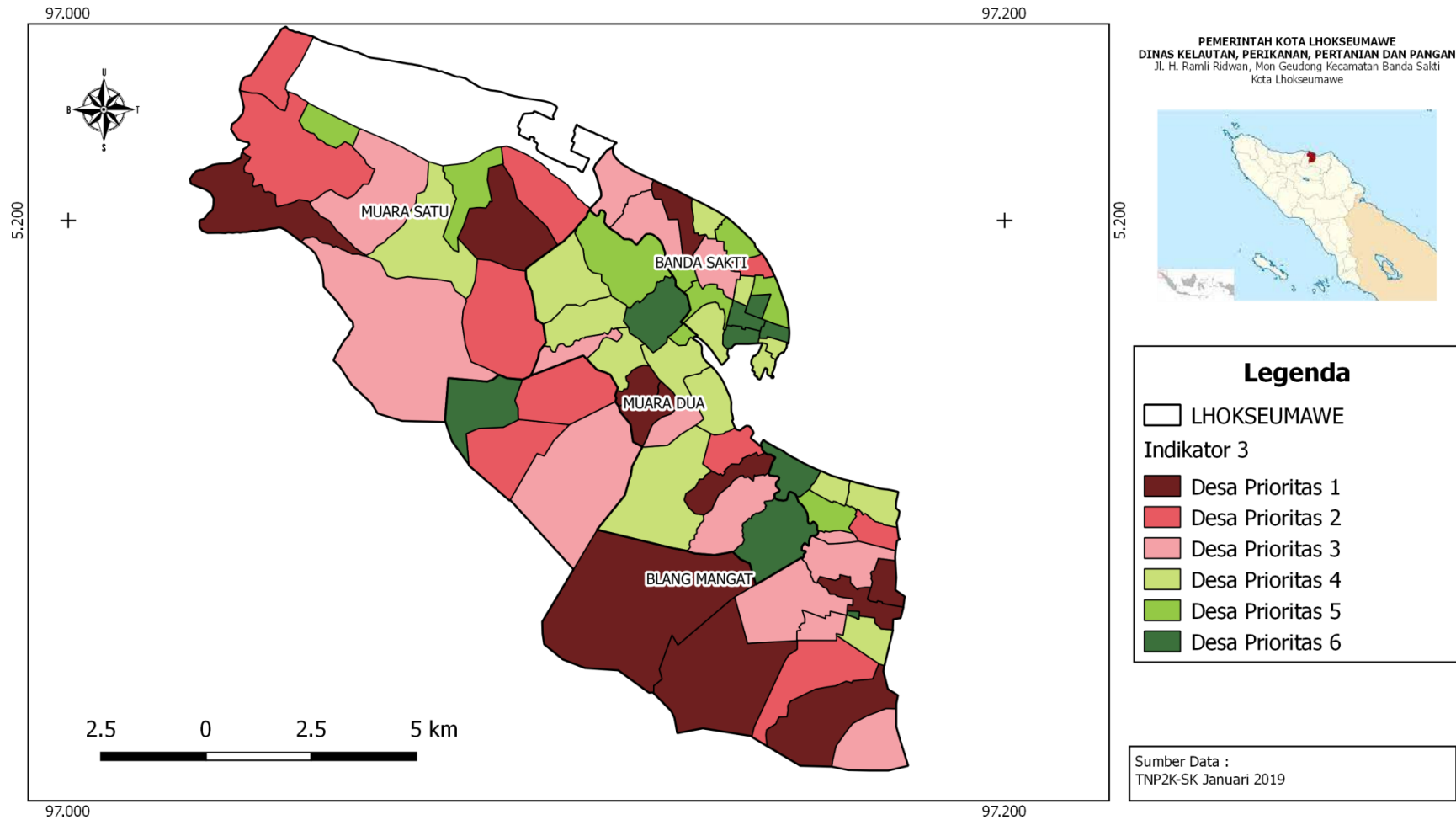


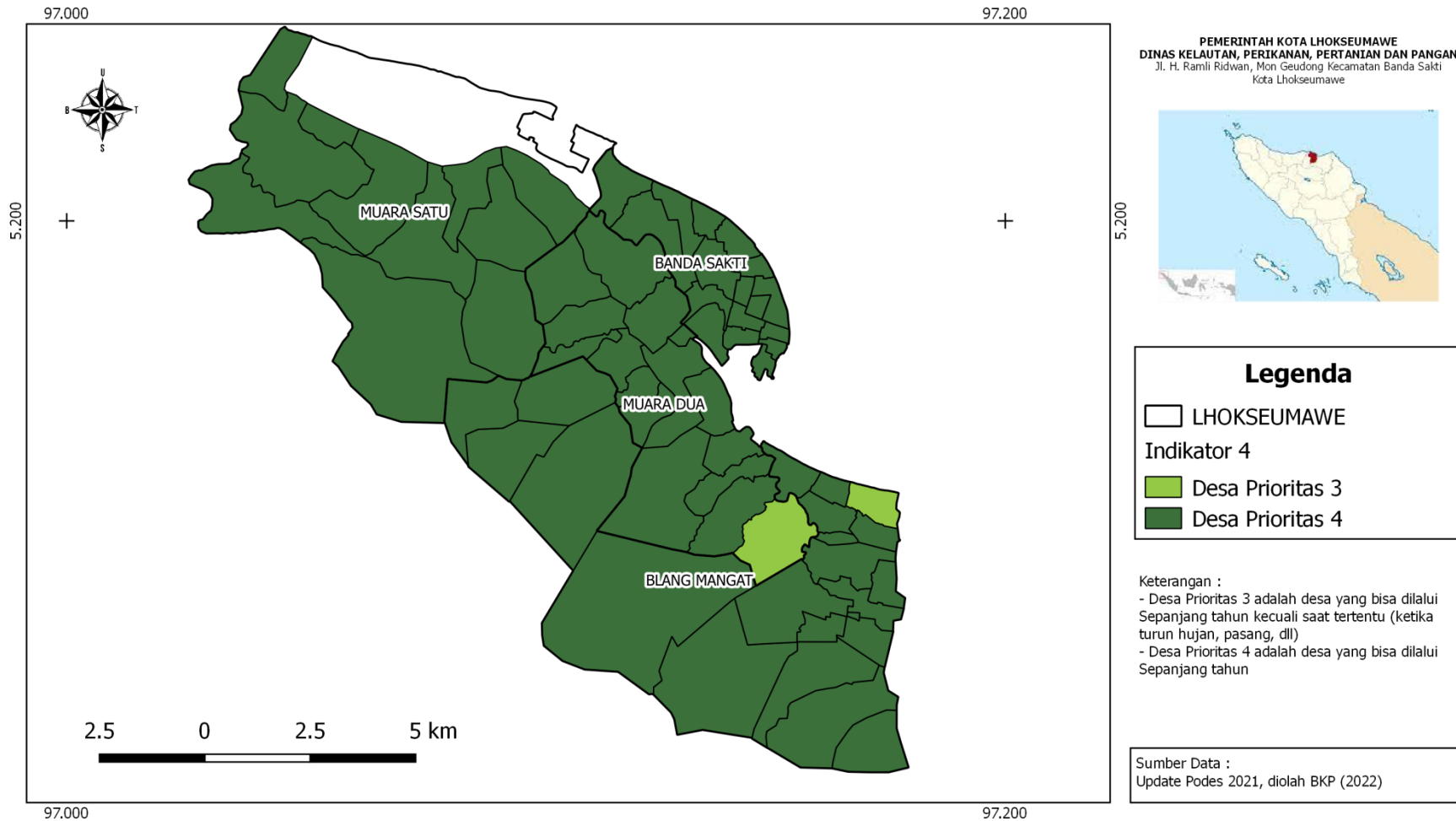
## PETA RASIO JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA TAHUN 2022





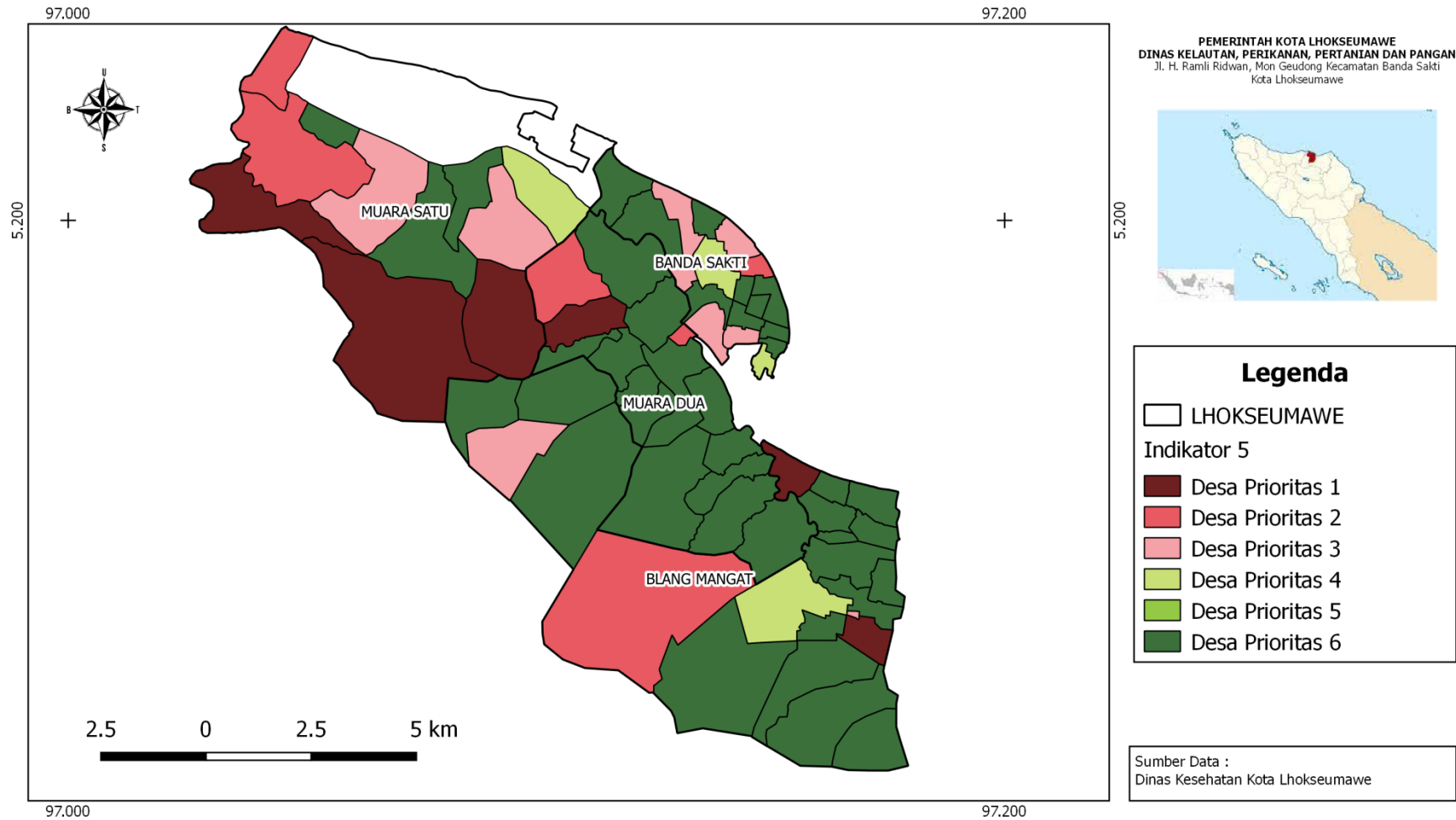
## PETA RASIO PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022





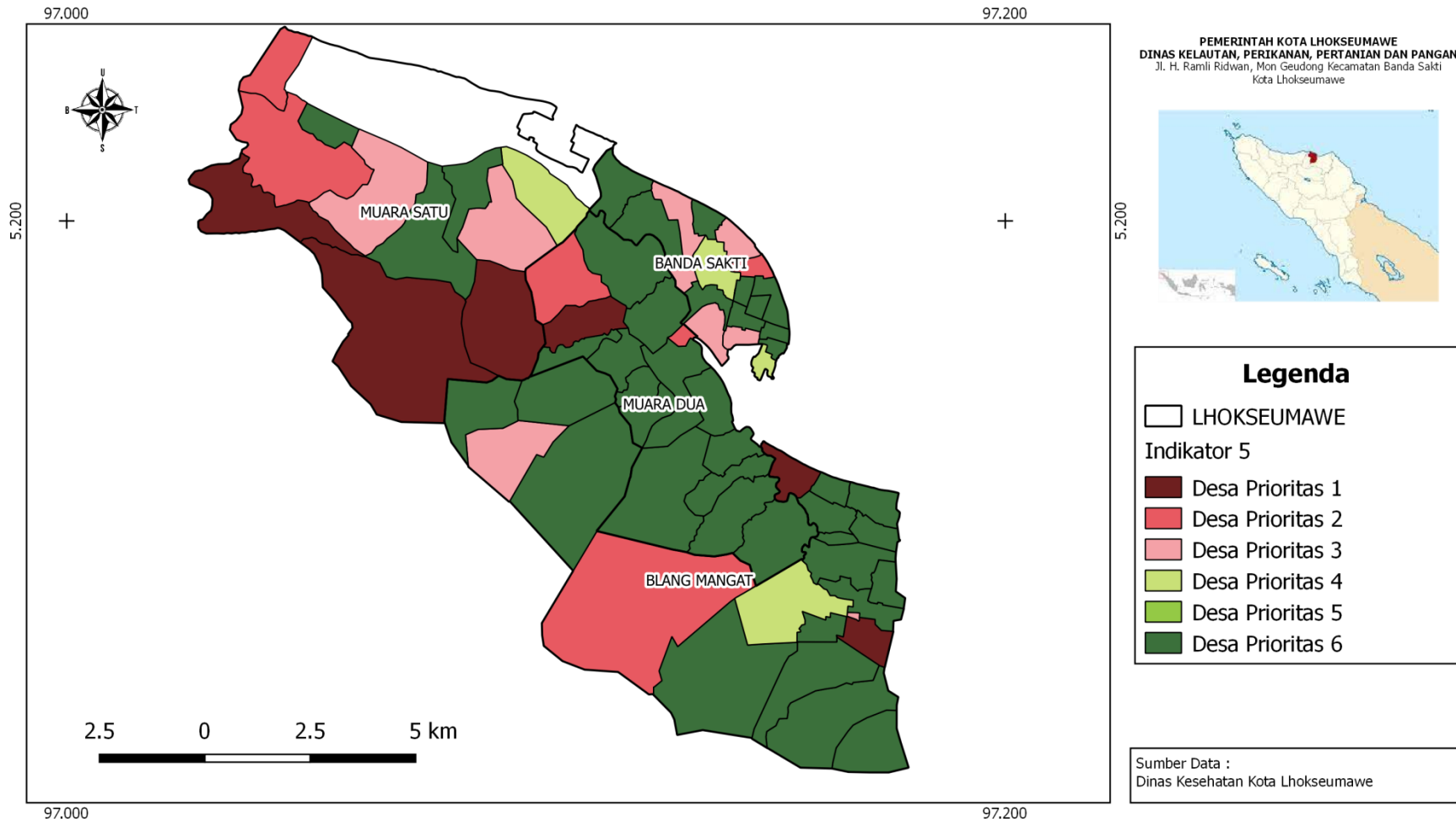


## PETA RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA TAHUN 2022





## PETA RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA TAHUN 2022





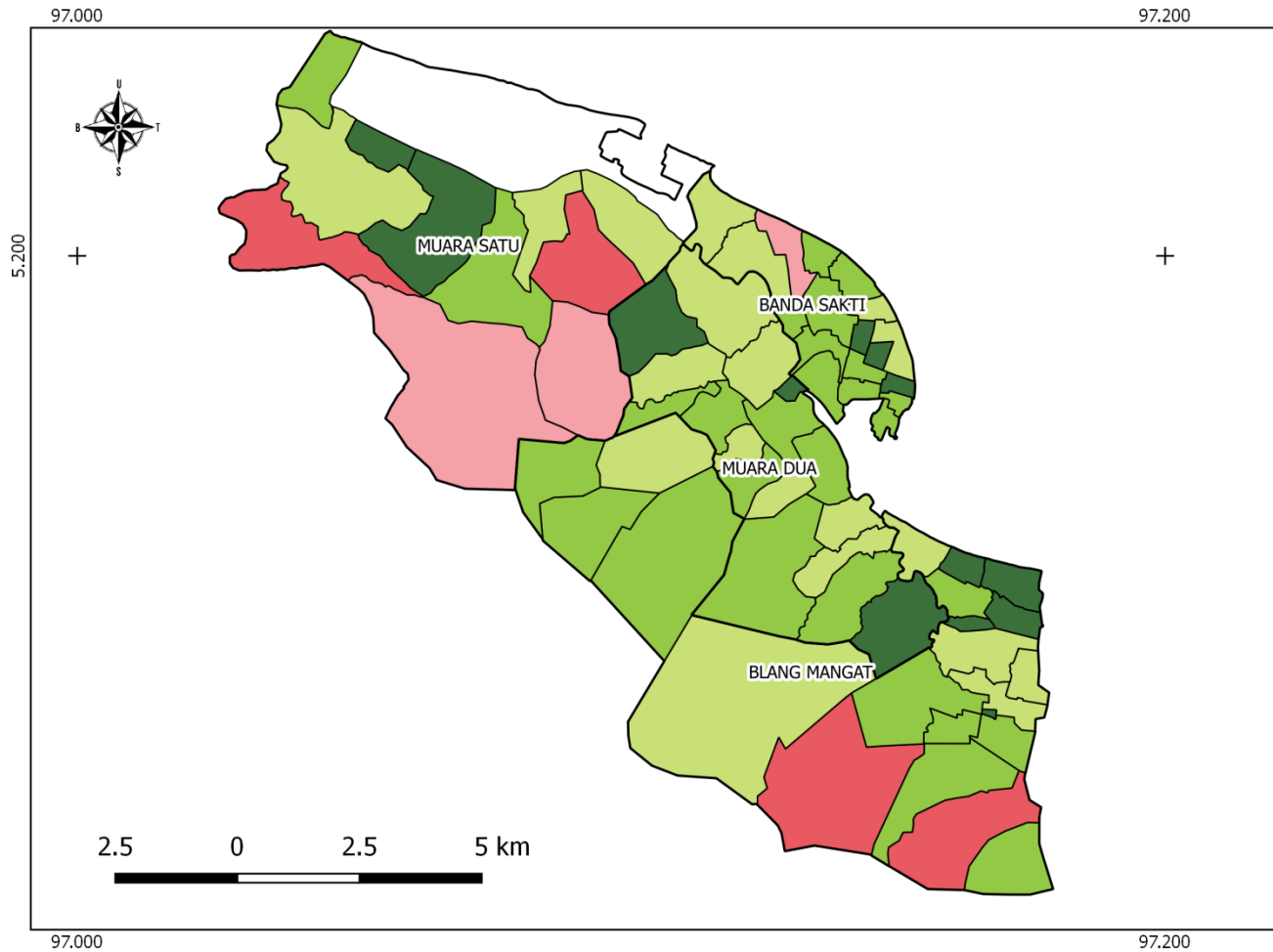


## PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK DESA PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK TAHUN 2022





# PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOTA LHOEKSEUMAWE TAHUN 2022



PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE  
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN  
Jl. H. Ramli Ridwan, Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti  
Kota Lhokseumawe



## Legenda

- LHOEKSEUMAWE
- Komposit
- Desa Prioritas 1
- Desa Prioritas 2
- Desa Prioritas 3
- Desa Prioritas 4
- Desa Prioritas 5
- Desa Prioritas 6

Sumber Data :  
1. Pusdatin-Kementan 2019, diolah BKP (2020)  
2. Update Podes 2021, diolah BKP (2022)  
3. TNP2K-SK Januari 2019  
4. Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe  
5. BPS/SP 2020